BAB IV

INTEGRASI PERADILAN HUKUM DENGAN PERADILAN

ETIK PERSPEKTIF KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN

DAN *SIYASAH QADHA'IYYAH*

Kesadaran akan hukum tidak hanya selalu berfungsi sebagai penegakan pengaturan, sanksi, dan perlindungan bagi masyarakat. Namun, hukum juga menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan agar hak-hak dan kepentingan mereka tidak saling bertentangan. Hukum harus mengakui prinsip kesetaraan, yang berarti setiap orang memiliki tempat yang sama dalam hukum tanpa memandang ras atau kasta. Hukum juga menjunjung tinggi setiap derajat manusia tanpa perkecualian. Hukum mengakui prinsip-prinsip dasar manusia, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan. Mereka berfungsi sebagai pelengkap menuju cita-cita hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan. Keadilan bukan sekedar apakah aturan tertentu baik atau buruk, lebih dari itu yakni tentang nilai dan moral yang terkandung dalam aturan tersebut, yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan lingkungan baik saat ini maupun di masa depan. Bagaimana keadilan yang diperlukan untuk kebaikan mewujudkan etika keadilan bagi manusia.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Rahmatullah Ayu H., "Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum," *UIRLawReview* 6, no. 2 (2022): 81.

Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia saat ini untuk mewujudkan cita-cita hukum selain asas-asas kekuasaan kehakiman yang harus diterapkan dengan, juga dibutuhkan peradilan etika yang hadir sebagai pondasi hukum dalam kondisi-kondisi krusialnya tersebut. Pembaharuan dibutuhkan mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya sistem peradilan etika yang efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya bagi pejabat publik.¹⁶⁵ Hukum ditegakkan bukan hanya mengejar keadilan belaka, melainkan terdapat dua nilai lain yang dikejar oleh hukum yaitu kepastian dan kemanfaatan.¹⁶⁶

Keberadaan peradilan etik sebagai penegak adanya kode etik sejatinya adalah langkah baik dalam penegakan nilai moral yang secara hakiki digunakan dalam upaya mewujudkan cita-cita yang sedari lama diharapkan masyarakat, yakni perwujudan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi dari kode etik yang sebenarnya dapat pula dimaknai sebagai harapan agar para profesional hukum mampu menjadikan hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging.¹⁶⁷ Namun justru sebaliknya sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, pengadilan saat ini justru berada pada kondisi yang rentan akan perdagangan putusan.¹⁶⁸

Dengan demikian, pelaksanaan peradilan etik sesungguhnya menjadi sangat penting seiring dengan upaya penciptaan putusan hakim yang berkeadilan di tengah semakin kompleksnya permasalahan dan hambatan hakim di lingkup peradilan.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia", 29

¹⁶⁶ FX Warsito Djoko S, *Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat* (Binamulia Huk, 2018), 26-35.

¹⁶⁷ A Ghani, "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Profesi Hakim," *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (2020), 202.

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2011), 209.

¹⁶⁹ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 114.

Bahkan Jimly Asshidiqie berpandangan akan perlunya konsepsi dari pada sistem peradilan etika. Menurut Jimly, dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan peraturan yang secara normatif membahas secara spesifik terkait etika, terutama dalam lingkup lembaga peradilan. Hal ini didasarkan bahwasanya infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri. Merujuk pada gagasan yang dikemukakan Jimly tersebut terkait pengembangan peradilan etika (*Court of Ethics*), yang mana seharusnya bekerja beriringan dengan peradilan hukum (*Court of Law*) dalam rangka menopang demokrasi yang sehat (tidak hanya bersifat prosedural-formal tetapi juga bersifat substansial), maka dalam konteks lembaga penyelenggara kekuasaan penegakan Etika ini, sudah seharusnya kita juga perlu mengembangkan penataan terhadap sistem etika (*rule of ethics*).

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris – *integrate; integration*- yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pepaduan.¹⁷⁰ Jadi Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Dengan terpisahnya peradilan hukum dan peradilan etik di Indonesia saat ini Integrasi merupakan isu penting dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perlunya sistem yang mampu menegakkan keadilan dan etika secara bersamaan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bagaimana maraknya penegakan hukum serta

¹⁷⁰ John M. Echlos and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 326.

dalam waktu yang bersamaan terjadi pelanggaran terhadap proses penegakan tersebut. Sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penegakan etik saat ini hanya dianggap sebagai formalitas prosedur ketika pelanggaran etik terjadi, tanpa memperdulikan seberapa jauh sebenarnya penegakan etik dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman. Tidak terpengaruhnya produk dalam peradilan etik terhadap produk hukum yang melanggar etika, menjadi perlu menurut penulis untuk saatnya melakukan intergrasi kedua peradilan tersebut.

Di tinjau dari konsep kekuasaan kehakiman kehendak integrasi memiliki kaitan penuh dengan pemahaman atau paradigma hukum yang dianut di Indonesia yang tidak lain adalah paradigma hukum positivisme. Menurut Soetandyo, kritik-kritik terhadap ajaran hukum kaum positivis yang legalistik bergerak ke arah upaya mengatasi silang selisih antara tertib perundang-undangan (*legal order*) dan tertib masyarakat (*social order*) dengan mengarahkan diterimanya. kebijakan untuk selalu meninjau ulang dan memperbaharui kembali setiap produk perundang-undangan dari waktu ke waktu dan tidak sebaliknya untuk memaksakan terkendalinya perubahan dalam masyarakat lewat penegakan-penegakan hukum yang konsekuen.¹⁷¹

Jika aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata), tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak, karena tidak mampu

¹⁷¹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Apa Dan Mengapa Critical Legal Studies: Sebuah Penjelasan Ringkas," in *Bahan Kuliah/Handout Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII*, 16.

menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri.¹⁷²

Menurut ahli filsafat sekaligus ahli hukum di Indonesia, O. Notohamidjojo, menyatakan bahwa ilmu hukum menuntut untuk menilai dalam dua segi, yakni isi peraturan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, aequitas, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai yuris, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara. Pendapat ini menguatkan alasan bahwa aliran positivisme hukum di Indonesia tidak berjalan sendirian, namun membutuhkan dimensi lain untuk menselaraskan antara kepastian dan keadilan hukum.¹⁷³

Beritik tolak dari beberapa aliran pemikiran hukum yang mengkritik teori hukum dari aliran pemikiran filsafat positivisme, maka penulis sepakat dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa pemikir positivisme “Hans Kelsen” bukan berarti tidak diperlukan, akan tetapi analisis perlu diperkaya dengan optik “kacamata” dan pendekatan baru. Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek kemanfaatan, menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan hidup manusia. Sedangkan, aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi

¹⁷² Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” *Law & Justice Journal* Vol.1, no. 1 (2018): 670.

¹⁷³ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 39.

keadilan dan norma-norma yang memajukankan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Artinya jika melihat dari aspek keadilan terhadap berjalanya sistem di Indonesia saat ini maka sulit untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan substantif, melainkan hanya keadilan prosdural. Karena pada dasarnya hingga sekarang kajian hukum positif berusaha dipisahkan dari nilai-nilai tertentu seperti moral. Padahal hukum positif dibuat dalam tatanan yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga ada nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhinya.

Oleh karenanya, pandangan sebagian kalangan positivisme yang mendudukan hukum lebih tinggi dari agama sebagai nilai dan etika merupakan paradigma yang dibangun atas pendefinisian bahwa norma hukum itu hirarkis yang dibawah norma hukum itu adalah etika. Padahal antara etika dan norma hukum merupakan suatu yang berbeda. Pelanggaran hukum sudah pasti termasuk dalam pelanggaran etika, sementara pelanggaran etika belum tentu termasuk pelanggaran hukum.¹⁷⁴ Oleh karena itu sebagai jalan keluar dari problema tersebut, pertamanya yang harus dilakukan yakni membangun paradigma hukum yang berkeadilan perlu disandingkan berbagai paradigma hukum yang berkembang termasuk paradigma hukum hasil dari pemikiran ahli hukum Indonesia yang terbangun dalam teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, yang kesemuanya merupakan koreksi dari paradigma positivisme hukum.¹⁷⁵ Sehingga dapat menciptakan suatu sistem hukum yang dapat diimplementasikan dan tentunya sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

¹⁷⁴ Ahmad Hakim and M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 97.

¹⁷⁵ Maryati, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadila. 87"

Selanjutnya, akan memungkinkan jika penegakan etik dapat masuk dan hadir dalam prosedur penegakan hukum, hal ini sebagai salah bentuk dari integrasi dalam unsur-unsur hukum dan etik guna:

- a) Meningkatkan akuntabilitas, dengan adanya peradilan etik yang terintegrasi, tindakan para hakim dapat diawasi lebih ketat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
- b) Mendorong Keadilan Substantif, dengan adanya integrasi ini memungkinkan penegakan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga mempertimbangkan etika.
- c) Membangun Kepercayaan Publik, hal ini perlu ketika masyarakat melihat bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan etika di kalangan penyelenggara negara, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik dalam perspektif konsep kekuasaan kehakiman adalah upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan moral. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman harus mencakup pengawasan dan penegakan standar etika di kalangan hakim dan aparat peradilan. Berikut adalah beberapa cara integrasi ini dapat diwujudkan menurut penulis:

1. Kerangka Hukum dan Etika yang Jelas

Membentuk kerangka hukum yang mengintegrasikan aturan-aturan hukum dengan prinsip-prinsip etika. Misalnya, peraturan yang mengatur perilaku hakim harus mencakup kode etik yang jelas dan tegas. Membuat

dan menerapkan undang-undang atau peraturan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada penegakan etika, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Sehingga administrasi keadilan dan pengaturan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral. Begitu pula dalam Islam, aturan hanya satu yakni yang terkandung dalam syariat dimana tidak hanya memuat pondasi hukum umat Islam namun juga memainkan peran penting sebagai panduan moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam kepastian hukum telah tercapai karena sumber dari syariat itu sendiri berupa aturan- aturan yang telah Allah SWT tetapkan.

2. Kelembagaan dan Prosedur

Mendirikan atau memperkuat lembaga independen yang bertugas mengawasi perilaku hakim dan aparat peradilan lainnya, tidak hanya itu lembaga tersebut juga berjalan bersamaan dengan berlangsungnya prosedur hukum. Sehingga proses peradilan bersifat transparan, di mana keputusan dan alasan di balik keputusan tersebut dipublikasikan. Ini membantu masyarakat untuk memahami bahwa hukum dan etika dijalankan dengan integritas. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran etika dan menerapkan sanksi disipliner. Dalam struktur peradilan, dapat dibentuk unit khusus yang fokus pada pengawasan etika. Dimana pengawasan tersebut bermuara terhadap keputusan hakim untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya legal tetapi juga etis. Sebagaimana dalam konsep *siyasah qadha'iyyah*, tercapainya keadilan hukum juga

menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Bahkan sejak ranah lembaga sudah tercermin tujuan keadilan hukum tersebut, lewat kolaborasi antara *al-Qadha* yang berfungsi sebagai lembaga peradilan formal yang memberikan putusan hukum, sementara *al-Hisbah* berperan dalam pengawasan dan penegakan moralitas serta pencegahan pelanggaran. Hingga dalam hal persidangan pun, *Qādi* harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.

3. Adopsi dan Penerapan Konsep Baru

Dengan mengadopsi dan menerapkan konsep yang terkait dengan integrasi peradilan hukum dan peradilan etik di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi dari tercapainya penyatuan dua peradilan tersebut. Misalnya dalam konsep Islam sendiri meskipun secara formal aturan mengenai peradilan etik tidak ada namun secara konsep penegakan etik dalam Islam dapat dijadikan contoh bagaimana dalam sistem peradilan Islam yang dapat menggabungkan prinsip-prinsip hukum syariah dengan norma-norma etik dalam tataran praktik. Karena pada dasarnya konsep *siyasah qadha'iyah* sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, atau dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Karena tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum dalam *siyasah qadha'iyah* adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta

melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi. Sehingga kemanfaatan hukum juga dapat diraih oleh siapapun.

Selain itu dari hukum barat sendiri terdapat konsep *mistrial* yang dapat dijadikan rujukan. *Mistrial* secara singkat berarti pembatalan sidang adalah bagian penting dari sistem peradilan Amerika Serikat yang berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil. Ketika situasi tertentu menghalangi keadilan, seperti kebuntuan juri atau kesalahan prosedural, pengumuman *mistrial* memungkinkan kasus untuk ditangani kembali dengan cara yang benar. Dengan demikian, sidang harus mulai lagi dengan memilih juri baru setelah keputusan pembatalan tersebut.¹⁷⁶

Meskipun begitu, konsep demikian bukan perkara mudah merealisasikannya dalam tataran praktik. Hal tersebut sekali lagi karena adanya perbedaan Paradigma atau pemahaman mengenai seyogyanya hukum di Indonesia, peradilan hukum seringkali berfokus pada aspek legal formal, sementara peradilan etik lebih menekankan pada norma-norma moral dan etika. Jika dalam hal implementasi tidak memperhatikan prinsip-prinsip atau akar sistem hukum secara terlebih dulu maka hal ini bisa menyebabkan konflik dalam penerapan keputusan.¹⁷⁷ Selain itu, kurangnya kesadaran etika juga menjadi salah satu penyebab sulitnya integrasi tersebut untuk diterapkan. Banyak hakim dan penyelenggara negara yang belum sepenuhnya memahami pentingnya etika dalam menjalankan tugas mereka,

¹⁷⁶ Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika* (Padang: Ekasakti University Press, 2011), 6.

¹⁷⁷ Ishmah Purnawati, "Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence," *Mahkamah Agung.Go.Id*, last modified 2021, accessed December 8, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>.

sehingga perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif mengenai etika profesi.

Akan tetapi banyak tantangan bukan berarti tidak mungkin sebab integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya berdasarkan hukum positif tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika. Dengan mengadopsi kerangka hukum dan etika yang jelas, mendirikan lembaga pengawasan yang kuat, menyediakan pendidikan dan pelatihan etika, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan sanksi yang efektif, sistem peradilan dapat menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam arti yang sesungguhnya.